

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Awal tahun 1950-an segera setelah kemerdekaan Negara Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa diseluruh dunia, terutama oleh Belanda sebagai bekas penguasanya selama 3,5 abad, maka timbulah keinginan dari para pendiri bangsa termasuk di dalamnya adalah Muhammad Hatta untuk membangun bangsa Indonesia supaya bisa maju, tidak terbelakang, dan dihormati bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju atau yang sudah merdeka lebih dahulu (Mubyarto, 1988: 5).

Pembangunan yang dilakukan oleh Negara Indonesia pada waktu itu mencakup dalam semua bidang. Dalam hal ini, Muhammad Hatta sebagai salah satu *founding fathers republic*, memprioritaskan perhatiannya dalam bidang ekonomi. Selain dari latar belakangnya sebagai seorang sarjana ekonomi, Hatta pun tersentuh hatinya akan keadaan rakyat Indonesia yang sebagian besar menderita kemiskinan.

Pembangunan ekonomi disuatu Negara memang sudah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan atau dikesampingkan karena pada hakikatnya kesejahteraan yang didambakan oleh suatu bangsa pada umumnya dilihat dari perekonomian yang ada dan dijalankan di Negara tersebut.

Muhammad Hatta, dalam pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konperensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946, “Perekonomian suatu Negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. *Pertama* : kekayaan tanahnya. *Kedua* : kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan Internasional. *Ketiga* : sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya” (Swasono, 1987: 1).

Perekonomian dalam suatu Negara pada umumnya adalah tolak ukur dari kesejahteraan. Apabila perekonomian suatu Negara baik atau bahkan sangat baik, maka bisa dikatakan penduduk di Negara tersebut sudah bisa merasakan kesejahteraan yang dicita-citakan. Apabila sebaliknya, dengan kata lain perekonomian suatu Negara buruk (tidak baik), maka penduduk yang ada di Negara tersebut sangat jauh dari kesejahteraan yang mereka inginkan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi akan mempertinggi kemampuan bangsa untuk melaksanakan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Sebaliknya, sektor-sektor lain pada umumnya juga akan memperbesar kemampuan bangsa yang bersangkutan untuk membangun ekonominya (Esmara, 1987: 352).

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan rumah tangga nasional untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup penduduk. Dengan demikian, pembangunan adalah sebuah proses menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana secara *arif* dirumuskan oleh para *founding fathers republic* ini dalam

*mukaddimah* UUD 1945. Kalimat tersebut menegaskan bahwa pembangunan bukanlah proses peniduran atau pembodohan tetapi sebuah kerja dari seluruh komponen bangsa untuk memenuhi seluruh hajat hidup rakyat dan meningkatkan taraf peradaban (Muhammad, 2002: 2).

Hubungan antara manusia dan pembangunan ekonomi bersifat timbal-balik. Manusia memerlukan pembangunan ekonomi agar kebutuhan-kebutuhan materinya lebih terpenuhi. Tetapi sebaliknya dalam pembangunan ekonomi, peranan manusia sangat menentukan. Ia berperan ganda yaitu sebagai *pengarah* (subyek) yang menentukan sifat atau “warna” pembangunan ekonomi, dan sekaligus sebagai *pelaku* (faktor) produksi yang bersama-sama faktor produksi *non-manusia* (tanah, modal dan teknologi) menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan tersebut (Mubyarto, 1988: 42).

Kegiatan manusia dalam rangka mempertahankan kehidupannya diberi kebebasan sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Namun dalam kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak dikarenakan kebebasannya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam hal kebebasan seperti ini, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran kebebasan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik dan mempengaruhi ketercapaian dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebebasan dalam sebuah sistem ekonomi ini biasa disebut sistem kapitalis, pada dasarnya akan mempengaruhi tingginya suatu persaingan antara sesamanya dalam rangka supaya para pelaku pasar tidak tersingkir

dari pasar. Dalam kondisi seperti ini, sering kali para pelaku pasar melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Wujud hubungan antara sesama menimbulkan persepsi membenaran akan apa saja yang dilakukan oleh pelaku pasar dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan, sehingga kadangkala para pelaku tidak akan menghiraukan apakah usaha yang dilakukan itu sesuai dengan moral atau bahkan sebaliknya (Sudarsono, 2004: 92).

Kecenderungan sistem ekonomi seperti ini dirasa akan membawa dampak yang sangat negatif bagi keberlangsungan ekonomi Negara, terlebih lagi untuk Negara yang sedang berkembang dimana para pelaku pasar akan mementingkan kepentingannya sendiri. Bagi orang-orang yang sudah mempunyai tingkat perekonomian yang mapan, mereka tidak akan banyak mempedulikan orang yang kurang mampu dikarenakan kepedulian terhadap sesama bukan prioritas utamanya.

Sistem kapitalis ini tidak semata-mata lagi didukung oleh sikap asketis para pelaku ekonomi, namun kapitalisme telah membangun sistemnya sendiri dan kapitalisme kini bukan semata-mata memenuhi kebutuhan, namun telah menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang sebenarnya lebih merupakan keinginan semata.

Ideologi kapitalis ini cenderung memikirkan bagaimana supaya semua manusia yang ada di penjuru dunia bisa mengkonsumsi suatu produk sebanyak-banyaknya. Secara kasat mata, masyarakat memang telah dimanjakan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak ada batasnya.

Sementara itu, disisi lain masyarakat tidak sadar akan budaya konsumtif yang mereka jalani.

Sistem kapitalis sudah dipastikan akan melahirkan dua arah yang saling berlawanan. Satu arah akan mengantarkan mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan arah yang satunya menyeret mereka yang miskin menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinannya dengan jumlah yang terus membengkak dan ini akan memperburuk perekonomian suatu Negara.

Keadaan ini adalah suatu masalah yang sangat besar khususnya untuk rakyat miskin, seharusnya semua masyarakat sadar akan keterpurukan rakyat kecil karena sistem perekonomian kapitalis ini akan semakin memperburuk keadaan perekonomian rakyat kecil. Semakin terus membengkaknya kemiskinan yang melanda bangsa ini adalah jawaban atas kegagalan sistem perekonomian kapitalis.

Hatta sendiri sangat kecewa dengan sistem ekonomi liberalis-kapitalisme yang telah melahirkan imperialisme. Begitu juga dengan sosialisme marxisme yang tidak menghargai hasil kerja individu. Kedua sistem ekonomi itu menurut Hatta bersifat sekuler dan membawa manusia kepada pendewaan dirinya (*anthropocentrism*) sehingga menggeser Tuhan sebagai pusat dan penentu dalam kehidupan ini sebagaimana terdapat dalam paham ekonomi liberalis-kapitalisme. Bahkan lebih jauh dari itu mereka malah tidak lagi mengakui eksistensi Tuhan itu sendiri seperti terlihat dalam paham ekonomi sosialis marxisme, sehingga kedua sistem ekonomi ini telah

membawa dampak buruk kedalam kehidupan ummat manusia (Anwar Abbas, 2010: 129)

Pemikiran-pemikiran Muhammad Hatta di bidang ekonomi pada umumnya selalu mengedepankan *kemaslahatan* orang banyak atau lebih tepatnya selalu berpihak pada rakyat miskin.

Muhammad Hatta sendiri telah meletakkan pemikiran tentang ekonomi kerakyatannya secara sistemik di dalam UUD 1945. Menurut Hatta, Pasal 33 “...*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama yang dikerjakan secara kekeluargaan (Pamungkas, 1996: 1).

Salah satu contoh pemikiran Muhammad Hatta yang berpihak pada kaum kecil (miskin yang teraniaya) ialah tentang bagaimana mempersatukan rakyat kecil dalam pengembangan usaha koperasi yang berbasis kekeluargaan supaya mereka bisa bekerjasama dalam meningkatkan taraf perekonomiannya.

Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat, kemudian diejawantahkan dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” karena pemikiran-pemikiran ekonominya yang pro-kerakyatan (Alfarisi, 2009: 118).

Berkaitan dengan pemikiran ekonomi koperasi yang dikembangkan Hatta, jelas terlihat pemihakannya pada ekonomi rakyat. Pemihakan ekonomi rakyat bisa dinyatakan dengan pemihakan kepada mereka yang tertindas dan teraniaya. Mereka yang melakukan advokasi terhadap mereka yang tertindas terutama secara sistemik dan struktural, jelas merupakan pahala yang besar (Abas, 2010: XV).

Memperhatikan persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pemikiran Muhammad Hatta di bidang ekonomi yaitu tentang pemikirannya mengenai ekonomi kerakyatan, dan dalam kesempatan ini penulis akan mengangkat sebuah judul “Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Perspektif Islam”.

## **B. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Agar tidak terjadi kerancuan dalam memakainya, maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

### **1. Pemikiran**

Proses, perbuatan, cara memikir, problem yang memerlukan pemecahan (Suharso, 2005: 380).

## 2. Muhammad Hatta

Wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, adalah sosok pemimpin yang berwatak jujur dan disiplin, Muslim yang saleh, negarawan yang demokrat, dan ekonom yang berideologi kerakyatan. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 (Alfarisi, 2009: 11).

## 3. Ekonomi

Pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan; penghematan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi (Suharso, 2005: 128).

## 4. Kerakyatan

Segala sesuatu yang mengenai rakyat; demokrasi; kewarganegaraan (Suharso, 2005: 404). Dalam hal ini, penulis mengerucutkan pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan terfokus pada pemikiran beliau mengenai konsep koperasi.

## 5. Perspektif

Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Suharso, 2005: 376).

## 6. Islam



Agama yang diajarkan Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Alquran, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT (Suharso, 2005: 191).

Berpijak dari penjelasan diatas, maka maksud dari judul diatas adalah menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan (konsep koperasi) apabila dilihat dari sudut pandang agama Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan?
2. Bagaimana Tinjauan Islam terhadap Ekonomi Kerakyatan ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan serta mengetahui sejauh mana paralelitas pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan dengan ajaran Islam dalam bidang ekonomi.

Selain memiliki tujuan yang jelas, penelitian ini juga tidak terlepas dari manfaat yang akan diperoleh. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam ilmu ekonomi dan ajaran Islam pada umumnya dan pengetahuan tentang hubungan ekonomi kerakyatan dengan ajaran Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian serupa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap bahwa dari hasil penelitian yang akan dilakukan dapat memberi manfaat dan sumbangan yang nantinya akan berguna bagi semua pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah-masalah mengenai ekonomi kerakyatan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Menurut penulis, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan ditinjau dari perspektif Islam. Tetapi, ada beberapa referensi skripsi terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. NP Basuki Ismael (UI, 1994), yang membahas tentang “*Paham Demokrasi Sosial Muhammad Hatta (Studi Pemikiran Politik Indonesia)*”. Dari hasil penelitian ini, dia menyimpulkan bahwa (<http://eprints.lib.ui.ac.id>) :

- a. Paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan sintesis antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
  - b. Hatta tidak hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat Minangkabau saja untuk membentuk konsepsi demokrasi sosialnya. Secara implisit dapat dikatakan bahwa kebiasaan gotong royong dan hak untuk menyatakan protes juga ditemukan diluar Minangkabau, seperti di tanah Jawa sewaktu sistem-sistem kerajaan masih berlaku.
2. Penelitian Joni Yusuf (UMS, 2008), yang membahas tentang *“Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam”*. Dia menyimpulkan 7 hal dalam penelitian tersebut. Ketujuh hal yang dimaksud adalah :
- a) Menurut Yunus, kemiskinan bukan diciptakan oleh orang miskin, tetapi diciptakan oleh tatanan sosial-ekonomi, maka kemiskinan dapat disingkirkan dari muka bumi.
  - b) Faktor-faktor kemiskinan di Bangladesh khususnya dan umumnya di Negara berkembang, antara lain:
    - 1) Kerangka teoritis asumsi yang merendahkan kapasitas manusia (orang miskin dianggap tidak dipercaya untuk mendapatkan kredit usaha).
    - 2) Orang miskin sering kali terjerat rentenir.
    - 3) Program-program kemiskinan internasional salah sasaran.
    - 4) Perbedaan persepsi dalam mendefinisikan orang miskin.

- c) Yunus memfokuskan untuk membantu kaum perempuan miskin, karena dalam masyarakat Bangladesh, kaum perempuan diperlakukan secara diskriminatif dan banyak menjadi pihak yang dirugikan.
- d) Yunus tertarik untuk membantu orang miskin, karena melihat kenyataan bahwa di lingkungan tempat dia mengajar, Chittagong University, banyak ditemukan kaum miskin. Padahal dia adalah dosen dan dekan Fakultas Ekonomi yang sehari-harinya mengajar teori ekonomi.
- e) Model-model pengentasan kemiskinan yang dilakukan Yunus, antara lain:
  - 1) Yunus mengenalkan program pemberdayaan yang dikenal dengan kewirausahaan sosial.
  - 2) Yunus mendirikan Grameen Bank dan memberikan pinjaman modal kepada kaum perempuan miskin di Bangladesh.
  - 3) Yunus mendorong kaum perempuan (peminjam) untuk menabung.
  - 4) Yunus memberikan kesempatan kepada perempuan (nasabahnya) untuk memiliki saham di Grameen Bank.
- f) Dalam membantu kaum miskin perempuan, Yunus menghadapi banyak kendala, antara lain:
  - 1) Pada saat perjuangannya, kurang mendapat dukungan dari pihak bank untuk memberi pinjaman kepada kaum miskin.

- 2) Keyakinan *purdah*, yang tidak memperbolehkan kaum laki-laki masuk rumah perempuan yang bukan mukhirmnya.
  - 3) Sebagian besar kaum miskin perempuan buta huruf.
  - 4) Adanya pihak-pihak yang mencurigai sepak terjang Yunus, dan berusaha menghalangi keinginan Yunus yang tulus untuk membantu kaum miskin.
- g) Beberapa bentuk dukungan yang memperlancar perjuangan Yunus, antara lain:
- 1) Dukungan rekan dosen dan mahasiswa Chittagong University terhadap kegiatan Yunus.
  - 2) Kepemilikan pegawai perempuan Grameen Bank.
  - 3) Bunga Grameen Bank tidak bertentangan dengan syariah Islam.
3. Penelitian Rina El Maza, yang membahas tentang “*Konsep Koperasi Konsumsi Muhammad Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam penelitian ini, dia menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang penting dalam koperasi konsumsi Muhammad Hatta yaitu permodalan, keanggotaan dan prinsip-prinsipnya. Selain itu, apabila koperasi konsumsi Muhammad Hatta di lihat dalam perspektif Islam, secara substansial jelas dapat dikatakan paralel dengan ajaran Islam. Karena penekanan Hatta lebih mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam koperasi tersebut dan tidak disampaikan dalam formalisme dan simbol-simbol Islam (<http://rac.uui.ac.id>).

4. Penelitian M. Handar Arraiyyah (2004) dengan mengambil judul “*Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur’an*” menyimpulkan bahwa kemiskinan yang melanda seseorang tidaklah berarti bahwa ia dibenci Tuhan. Sebaliknya, kekayaan yang dianugerahkan kepada seseorang tidak pula berarti bahwa ia dikasihani oleh Tuhan. Kekayaan ataupun kemiskinan merupakan ujian Tuhan bagi manusia. Manusia yang sabar dalam menghadapi ujian hidup akan dikasihani oleh Tuhan. Demikian pula halnya bagi manusia yang bersyukur tatkala di beri nikmat, ia akan dikasihani oleh Tuhannya. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama berpeluang untuk mendapatkan ridha Allah melalui iman dan amal saleh.

## **F. Metode Penelitian**

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian bibliografis, karena penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta, hasil pemikiran, dan ide-ide yang tertulis oleh para pemikir dan ahli (Nasir, 1988: 62) yang dalam hal ini adalah Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan.

Dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Nasir, 1988: 54).

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *historis-normatif-filosofis*. Pendekatan historis adalah digunakan untuk memperoleh data biografi pemikiran Muhammad Hatta. Sedangkan pendekatan filosofis adalah menganalisis sejauh mana pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut (Baker, 1994: 15).

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yakni mencari bahan-bahan penyusunan yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar dan artikel yang nantinya dijadikan data yang berupa sumber primer dan sekunder.

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Hatta yang berjudul berjudul "*Beberapa Fasal Ekonomi*" terbitan tahun 1945 dengan penerbit Balai Poestaka Djakarta. Buku tersebut penulis jadikan sebagai data primer karena dalam buku tersebut terdapat pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan (yang terfokus pada konsep koperasi) yang secara langsung ditulis oleh Muhammad Hatta sendiri. Sedangkan data sekunder adalah semua sumber-sumber yang menunjang dan mendukung dalam pembahasan skripsi ini, seperti buku yang ditulis oleh Melani Sritua Arief "*Ekonomi Kerakyatan*" tahun 2001, "*Ekonomi Kerakyatan : Mengenang Bung*

*Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan*” tahun 2002, Sri Bintang Pamungkas “*Pokok-Pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*” tahun 1996, Sri Edi Swasono “*Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*” tahun 1987, dan lain-lain.

#### 4. Metode Analisis Data

- a) Induktif, yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum (Baker, 1994: 64).
- b) Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c) Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Perspektif Islam (Baker, 1994: 54).

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh. Adapun sistematikanya seperti berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



## BAB II. PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA

Pada bab ini berisi tentang Riwayat Hidup Muhammad Hatta, Karya dan Pemikiran Muhammad Hatta tentang Koperasi.

## BAB III. EKONOMI ISLAM

Pada bab ini berisi tentang Hukum Islam, Definisi Ekonomi Islam, Landasan Ekonomi Islam, Karakteristik Ekonomi Islam, Prinsip Ekonomi Islam, Tujuan Ekonomi Islam.

## BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Analisis mengenai Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan dalam Pandangan Islam.

## BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.